



BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu disusunlah LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2024.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk evaluasi sasaran dan program kegiatan ditahun mendatang guna menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan untuk mendukung pencapaian transisi pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024 – 2026.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

SOFYAN, SH
NIP. 197212302009011002

DAFTAR ISI

Uraian	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Gambaran Umum	5
C. Struktur organisasi	5
D. Aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi	6
Bab II Perencanaan Kinerja	8
A. Perencanaan	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Indikator Kinerja Utama	10
B. Perjanjian Kinerja	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	12
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B. Realisasi Anggaran	27
Bab IV Penutup	44

DAFTAR TABEL

Uraian	Hal
Sasaran Strategis, Indikator Target dan Realisasi.	iii
Tabel 1.1. ASN Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.2. ASN Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Tahun 2024-2026	9
Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	11
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)	11
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	12
Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Sasaran Strategis 1	14
Tabel 3.3. Data Series Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024 Sasaran Strategis 1	14
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Sasaran Strategis 1	15
Tabel 3.5. Realisasi PAD berdasarkan Target DPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024	15
Tabel 3.6. Realisasi Tamu Wisma Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023	16
Tabel 3.7. Realisasi Pelayanan Mobilisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024	17
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	18
Tabel 3.9. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Sasaran Strategis 2	19
Tabel 3.10. Data Series Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024 Sasaran Strategis 2	20
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Sasaran Strategis 2	20
Tabel 3.12. Realisasi Pelayanan Koordinasi Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2022-2024	21
Tabel 3.13. Jumlah Warga Terlantar asal NTB yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023-2024	21
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	23
Tabel 3.15. Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Sasaran Strategis 3	23
Tabel 3.16. Data Series Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024 Sasaran Strategis 3	24
Tabel 3.17. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Sasaran Strategis 3	24
Tabel 3.18. Jumlah Pengunjung Anjungan NTB Tahun 2020-2024	25
Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tahun 2024	27
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Tahun 2024	28
Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Per Bidang Urusan Tahun 2024	37

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB.

Adapun capaian dan realisasi strategis badan penghubung Daerah Pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Target dan Realisasi.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB	Pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB	95 %	95,23 %	100 %
	Meningkatnya kualitas koordinasi hubungan antar Lembaga di Jabotabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordiansi kelembagaan	95 %	95,25 %	100 %
	Meningkatnya kualitas promosi dan informasi seni dan budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	95 %	95,25 %	100 %

Sumber : Badan Penghubung Daerah 2024

Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tiga capaian indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan Pj. Gubernur NTB Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi NTB tahun 2024-2026 telah telaksana dengan baik. Berdasarkan tingkat kepuasan persentase pelayanan penghubung telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB terealisasi 95,23% meningkat 0,23% dari target 95%, Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordiansi kelembagaan dan Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII masing-masing indikator dengan target 95% dan terealisasi 95,25% meningkat 0,25%.

Dalam pengelolaan PAD, Realisasi Retribusi sebesar 113,60% yaitu sebesar Rp.164.380.000,- dibanding target dalam ditetapkan oleh BAPENDA sebesar Rp.144.700.000,-. Penerimaan Retribusi tersebut berasal dari pelayanan tamu penginapan Wisma NTB.

Realisasi Keuangan sebesar 96,71% dengan jumlah Rp.16.825.526.112,- dari Pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rp.17.398.149.258,- yang dengan memaksimalkan penyerapan anggaran pada belanja Pegawai 42,95% dengan jumlah Rp.7.226.563.465,- dan Kegiatan (Barang dan Jasa) 57,05% dengan jumlah Rp.9.598.962.646,- yang terbagi pada masing-masing sub kegiatan baik unsur penunjang pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan penghubung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penghubung daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan, dimana badan penghubung memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, berupa koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penghubung Daerah menyadari betul akan pentingnya penyusunan laporan kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dengan apa yang telah dilakukan dalam pembangunan daerah selama satu tahun.

B. Gambaran Umum

a. Tugas Pokok

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat diantaranya :

1. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi, Pelayanan serta Tata Usaha.
2. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat NTB di Jakarta;
3. Menyusun bahan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintah daerah dan masyarakat NTB di Jakarta;
4. Menyusun bahan pelaksanaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga-lembaga negara, perwakilan-perwakilan negara, lembaga lembaga lainnya, dan masyarakat NTB di Jakarta;
5. Menyusun bahan pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di Jakarta;
6. Menyusun bahan pengelolaan Anjungan Daerah NTB di Taman Mini Indonesia Indah.
7. Menyusun bahan pengelolaan Wisma NTB di Jakarta;
8. Menyusun bahan fasilitasi promosi dan informasi NTB;
9. Menyusun bahan pelaksanaan ketatausahaan dalam tata kelola pemerintahan Badan Penghubung Daerah;

b. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Badan Penghubung Daerah mempunyai fungsi :

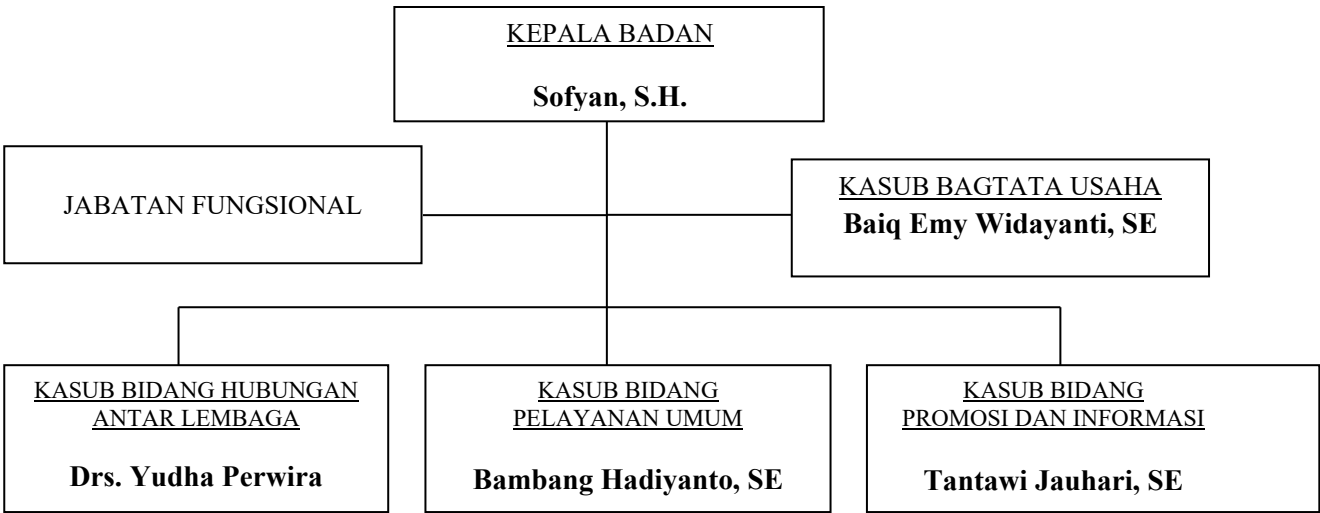
1. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Penghubung Daerah;

2. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
3. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penghubung Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Renstra 2024-2026, Badan Penghubung Daerah didukung oleh perangkat organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan Antar lembaga, Sub Bidang Pelayanan Umum dan Sub Bidang Promosi dan Informasi, adapun Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provisi NTB Tahun 2023



1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia masih menjadi satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam mewujudkan *Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik* yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024 – 2026. Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Badan Penghubung Daerah terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak.

Jumlah pegawai dilingkungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2022 sebanyak 78 orang, terdiri dari 45 PNS, 6 PTT dan 27 tenaga kontrak. Jumlah pegawai menurut status dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	29
3	Golongan II	14
4	Golongan I	0
5	PPPK	4
6	PTT	6
7	Tenaga Kontrak	27
	Jumlah	82

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2024.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	Magister	3	-	-	3
2	Sarjana	23	-	2	25
3	D3	2	4	-	6
4	SLTA/SMK	17	-	31	48
5	SLTP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-
	Jumlah	45	4	33	82

Sumber : Badan Penghubung Daerah, 2024.

Jumlah dan kualifikasi pegawai yang ada dirasa belum cukup berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk itu perlu adanya dukungan dan perhatian dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah didukung dengan moda transportasi berupa berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 12 unit, 1 Mini Bus, 1 Kendaraan Listrik (shuttle) dan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit. Terdapat 1 ruang rapat/pertemuan dan 36 kamar yang terdiri dari kamar hunian sebagai penghasil PAD sebanyak 24 Kamar, 3 kamar sebagai sarana administrasi perkantoran, 1 kamar untuk mushola dan 4 (empat) Kamar sebagai Pelayanan kepada Pimpinan daerah yang melakukan tugas dinas di Jakarta.

Untuk menjalankan kegiatan pelayanan, penyebaran informasi dan promosi daerah sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk fungsi promosi dan informasi badan penghubung mengelola anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi budaya pariwisata NTB.

D. Aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dengan memberikan pelayanan kepada pejabat, pegawai pemerintah provinsi, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta, serta memfasilitasi hubungan kerja dan tugas-tugas koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maka Badan Penghubung Daerah berkontribusi dalam pencapaian tujuan kelima yaitu “TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH melalui Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik”.

Dalam mendukung pencapaian misi tersebut, Badan Penghubung Daerah juga melaksanakan tugas fasilitasi pameran produk industri kecil menengah, promosi dan penyampaian informasi potensi NTB, serta pentas seni budaya di Anjungan NTB pada Taman Mini Indonesia Indah. Anjungan NTB pada TMII tersebut dimanfaatkan juga sebagai sarana penyampaian informasi dan mengenalkan daerah NTB, mengingat TMII dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai penjuru daerah termasuk wisatawan mancanegara. Dengan memaksimalkan fungsi promosi diharapkan kedepannya akan ada kerjasama dari semua perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam memberikan data terkait pariwisata serta data yang dibutuhkan dalam berinvestasi di NTB.

Dalam pencapaian visi misi dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 serta pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah, dirumuskan beberapa isu strategis yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah dalam memfasilitasi pimpinan daerah dan stakeholder lainnya.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dalam pelayanan publik pada Anjungan NTB di TMII.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah provinsi NTB dengan menjalin kerjasama dengan perangkat daerah pemerintah provinsi maupun daerah tingkat II dalam urusan koordinasi baik kelembagaan maupun kementerian di Jakarta.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 merupakan RPJMD yang bersifat transisi. RPD ini menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sejak tahun 2024 dengan mengusung visi “NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI NUSA TENGGARA” dimana dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) tujuan pembangunan NTB yaitu :

- Tujuan 1 : TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
- Tujuan 2 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)
- Tujuan 3 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI
- Tujuan 4 : TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI
- Tujuan 5 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
- Tujuan 6 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sdgs)
- Tujuan 7 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

1. Visi Dan Misi

Visi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan maupun organisasi sehingga visi itu penting untuk dituangkan dalam setiap perencanaan. Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka mencapai visi yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai mengetahui arah kebijakan instansi dan mengetahui alasan keberadaan serta peranannya dalam mewujudkan visi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut Badan penghubung menetapkan tujuan Renstra periode Tahun 2024-2026 yaitu : *“Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB”* .

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran utama yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB
- 2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Masyarakat NTB di Jabodetabek
- 3. Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB mendukung terwujudnya salah satu tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 yaitu *Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik*. Dimana Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik diantaranya tamu Wisma NTB, Pengunjung Anjungan NTB di TMII dan pelayanan koordinasi antar lembaga dan pembinaan masyarakat NTB. Pada tahun 2024-2026 diharapkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB; Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek; serta Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII dapat mewujudkan Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB yang mana Pelayanan Prima itu sendiri merupakan gambaran tercapainya Indeks Pelayanan Publik indikator Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2024-2026

Tujuan	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Tujuan Sasaran pada Tahun Ke		
			2024	2025	2026
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB		Indikator tujuan : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	95%	96%	97%
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Indikator Sasaran 1: Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	95%	96%	97%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Indikator Sasaran 2 : Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	95%	96%	97%
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Indikator Sasaran 3 : Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	95%	96%	97%

Langkah Kebijakan Strategis yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah dalam mewujudkan tujuan “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB” yaitu :

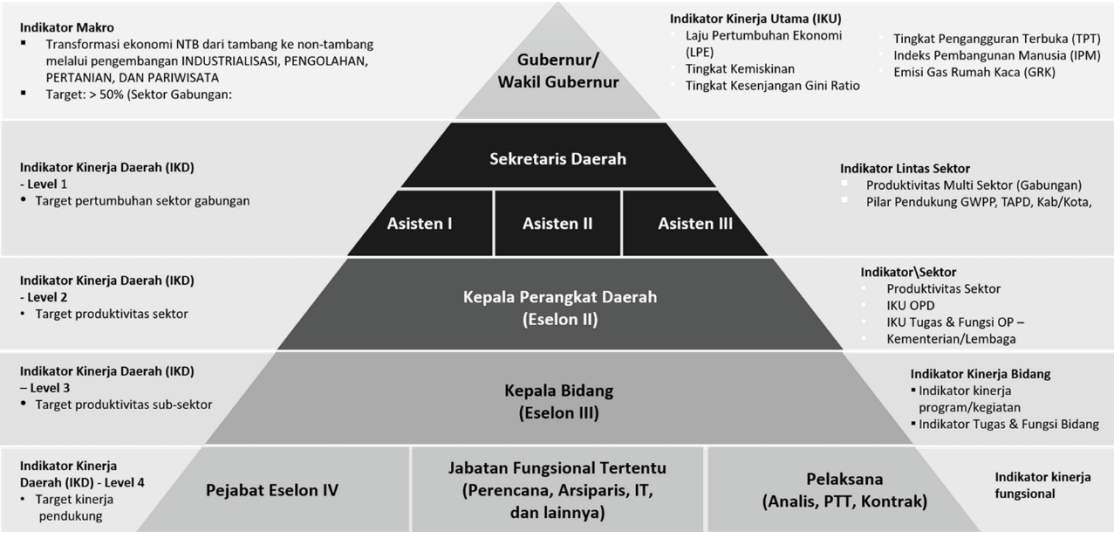
1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah dalam memfasilitasi pimpinan daerah dan stakeholder lainnya.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dalam pelayanan publik pada Anjungan NTB di TMII.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah provinsi NTB dengan menjalin kerjasama dengan perangkat daerah pemerintah provinsi maupun daerah tingkat II dalam urusan koordinasi baik kelembagaan maupun kementerian di Jakarta.

3. Indikator Kinerja Utama

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, indikator kinerja dapat diklasifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. IKU merupakan ukuran kemajuan daerah untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan dalam rencana Program Strategis yang bersifat lintas sektor dan sektoral. IKD merupakan capaian kinerja pemerintahan berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non-Dasar, dan Urusan Pilihan), dan Aspek Daya Saing.

Penyelenggaraan kinerja pemerintah Provinsi NTB dilakukan secara berjenjang dari level gubernur ke sekretaris daerah, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah (eselon II), kepala bidang (eselon III), hingga ke level pejabat eselon IV, jabatan fungsional tertentu (perencana, arsiparis, pranata komputer dan lainnya) dan pelaksana. Indikator Kinerja Utama (IKU) berada pada level gubernur dan dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada level di bawahnya. Penjabaran dari hierarki IKU dan IKD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1. Hierarki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)



Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung target produktivitas sektor yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
IKD Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026	Formula
			2024	2025	2026		
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	85%	91-95	96-97	>97	>97	Dihitung berdasarkan survei terhadap pelayanan yg diberikan Badan Penghubung
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	134.000.000	7-10	10-15	>15	>15	$= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \text{ } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$

Dalam mencapai target IKD tersebut, Badan Penghubung Daerah menetapkan indikator kinerja utama sebagai upaya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	$\frac{\text{Jumlah nilai hasil survey}}{\text{Jumlah bobot indikator}} \times 100$
			- Sumber Data : Laporan Hasil survei kepuasan tamu di Wisma NTB
2	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	$\frac{\text{Jumlah nilai hasil survey}}{\text{Jumlah bobot indikator}} \times 100$
			- Sumber Data : Laporan Hasil survei kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan
3	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI	$\frac{\text{Jumlah nilai hasil survey}}{\text{Jumlah bobot indikator}} \times 100$
			- Sumber Data : Laporan Hasil survei kepuasan pada Anjungan NTB di TMII

B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah dan untuk mencapai target tersebut maka membagi habis kinerja dalam cascading Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB hingga level pegawai sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	95%
2	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	95%
3	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI	95%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan ketaatan atas peraturan pemerintahan tentang pelaporan untuk memberikan transparansi dalam penggunaan keuangan negara yang baik dan bersih. Profesionalitas aparatur pengelolaan keuangan akan menjadi semangat kerja yang dinamis untuk menumbuhkan karya dan karsa dalam sektor rill kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menjadi keseimbangan antara perencanaan dan pencapaian, perumusan dan pencapaian. Sinkronisasi antara laporan akuntabilitas kinerja dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Dengan adanya laporan kinerja setiap tahunnya dapat menggambarkan trend yang dihadapi oleh setiap OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis serta permasalahan yang dihadapi. ketersediaan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dalam rangka perbaikan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2023)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN 2024
				TARGET	REALISASI Rp.	REALISASI %	
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	95%	>97%	91-95	-	95,23 %	100,24 %
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	Rp 154.260.000	>15%	7-10	164.380.000	6,56%	93,72 %

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dalam upaya Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah memiliki tujuan Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB dengan dua indikator kinerja daerah yaitu Tingkat kepuasan pelayanan penghubung dan Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi), sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2024-2026 hingga akhir tahun 2024, capaian kinerja Badan Penghubung menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Terjadi peningkatan tingkat kepuasan menjadi 95,23%, melampaui target sebesar 91-95%. Bahkan, jika dibandingkan dengan target akhir, capaian ini sudah mencapai 100,24. Namun, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan, termasuk kondisi Anjungan NTB di TMII yang memprihatinkan dengan bangunan tua yang tidak sesuai regulasi pengelola TMII dan fasilitas yang belum memadai. Selain itu, regulasi TMII mengharuskan setiap Anjungan memenuhi standar tradisi lokal dan mendukung program zero emission, menambah kompleksitas tantangan. Untuk mengatasi hal ini, Badan Penghubung Daerah telah mengambil langkah strategis, seperti pengadaan mobil listrik pada tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap program zero emission, dengan rencana penambahan mobil listrik pada tahun 2025. Selain itu, upaya penyesuaian bangunan tengah dilakukan melalui penyusunan Masterplan Anjungan NTB, yang menjadi langkah awal dalam memenuhi persyaratan regulasi sekaligus meningkatkan fasilitas dan representasi kearifan lokal.
- Terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 6,56%, mencapai Rp164.380.000. Meskipun demikian, capaian ini masih di bawah target yang berkisar antara 7-10%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kondisi Wisma NTB yang sedang dalam tahap peremajaan, dengan banyak fasilitas yang sudah tua dan memerlukan perbaikan, seperti wallpaper, penerangan, dan kamar mandi. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menentukan skala prioritas peremajaan fasilitas tersebut. Untuk meningkatkan kenyamanan tamu dan pendapatan Wisma NTB, Badan Penghubung Daerah telah melakukan perbaikan pada wallpaper luar kamar, karpet, dan gorden, serta memulai penggantian sprengki dan bed cover. Upaya ini sejalan dengan temuan bahwa fasilitas kamar yang memadai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan penginapan.

A.1. Sasaran Strategis

Badan Penghubung Daerah berperan dalam memperkuat koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah daerah dan pusat. Sasaran strategisnya mencakup peningkatan layanan keprotokolan, diplomasi daerah, serta optimalisasi penyediaan fasilitas bagi pemangku kepentingan. Melalui upaya ini, Badan Penghubung Daerah berkomitmen untuk mendukung promosi potensi daerah dan memastikan kepentingan daerah terakomodasi dalam kebijakan nasional. Berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 terdapat 3 (Dua) sasaran strategis dengan 3 (Dua) indikator kinerja utama yang akan diakuntabilitaskan capaiannya, yaitu :

A.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB

Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB dengan Indikator Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB yang dihitung dengan Kuesioner dengan satuan persentase.

A.1.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) pada salah satu sasaran strategis renstra 2024-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB. Hal tersebut tercermin pada capaian kinerja yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI %	TINGKAT CAPAIAN 2024
Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	95%	95,23%	100,24%

Berdasarkan tingkat kepuasan persentase pelayanan penghubung telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB terealisasi 95,23 % melebihi 0,23 % dari target 95 %.

A.1.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2024 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun 2024-2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dituangkan dalam data series tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.3. Data Series Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Kinerja	Capaian	Target	Kinerja	Capaian	Target	Kinerja	Capaian
Sasaran 1 :	Indikator Sasaran 1:									
Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	85%	85%	100%	100%	95%	95%	95%	95,23%	100,24%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Dari tabel yang disajikan terdapat peningkatan kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB sebesar 0,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana capaian ini didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana Wisma NTB yang semakin optimal.

A.1.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024

Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah tahun 2024 disajikan dengan cara membandingkan Target Kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	95%	95%	95,23%	100,24%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Realisasi target kinerja terlampaui dengan capaian 100,24% hal ini dapat tercapai karena konsistensi peningkatan sarana dan pra sarana Wisma NTB secara bertahap.

A.1.1.4. Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian Nasional

Dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah tahun 2024 – 2026 Badan Penghubung Daerah memiliki tugas dan fungsi pelayanan pimpinan, sebagai OPD penunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap Kepala Daerah saat berada di Ibu Kota. Dan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tidak mengintervensi indikator kinerja Nasional.

A.1.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan alternative yang telah dilakukan

Target kinerja kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada renja tahun 2024 adalah 95% sedangkan realisasi yang didapatkan 95,23% dengan capaian yang diraih sebesar 100,24%. Capaian tersebut dapat diraih dalam kinerja oprasional sebagai faktor pendukung yang akan dijelaskan dengan analisa dibawah ini.

Tabel 3.5. Realisasi PAD berdasarkan Target DPA
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Retribusi Sewa Kamar Wisma NTB		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2020	1.522.000.000,-	241.630.000,-	16%
2.	2021	1.542.800.000,-	90.260.000,-	6%
3.	2022	1.421.145.000,-	136.500.000,-	10%
4.	2023	140.000.000,-	154.260.000,-	110%
5.	2024	144.700.000,-	164.380.000,-	114%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Penerimaan PAD pada Pengelolaan Wisma NTB di Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh force majeure yaitu Pandemi Covid-19 dimana diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia serta regulasi Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.

- Faktor Penyebab Keberhasilan :** Adanya Perbaikan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Peningkatan sarana dan prasarana Wisma NTB memberikan wajah dan nuansa baru yang lebih fresh bagi tamu yang menginap, secara bertahap sedikit demi sedikit, mulai dari AC kamar-kamar, AC Lobby, Ruang makan Lt 2, wallpaper, karpet, pengecatan, taman, dan masih banyak lagi pembenahan dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan tujuan memberikan servis/kenyamanan tamu wisma baik yang menginap maupun yang berkunjung ke Wisma NTB.
 Dari sisi pelayanan mobilisasi Badan Penghubung Daerah berupaya maksimal memfasilitasi pelayanan pimpinan serta perangkatnya saat berkegiatan di Jabodetabek.
- Faktor Penyebab Kegagalan :** Belum adanya peraturan daerah yang mewajibkan aparat sipil negara untuk menggunakan fasilitas Badan Penghubung Daerah apabila melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Dimana di dalam Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta. Adapun evaluasi dari upaya penerapan Pergub ini kembali lagi ke fasilitas yang diberikan Wisma NTB belum mendekati Hotel bintang 3 sehingga upaya revisi Pergub masih perlu dikaji secara berkala sesuai peningkatan sarana dan prasarana Wisma NTB.

A.1.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas suatu organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya, baik finansial, manusia, maupun material, dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6. Realisasi Tamu Wisma Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Uraian	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
Laki	18	4	10	8	13	9	10	14	12	20	20	24	162
Perempuan	3	-	-	5	7	8	28	12	19	13	21	3	119
Total													281

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Jumlah tamu Wisma NTB pada tahun 2024 sebanyak 281 tamu yang menginap di Wisma NTB dengan rincian jumlah gender sebanyak 162 Laki-laki dan 119 Perempuan. Jumlah ini menunjukkan Wisma NTB nyaman untuk ditempati baik laki-laki maupun perempuan. Dimana tamu-tamu tersebut menempati 26 Kamar Aktif Wisma NTB, hal ini menunjukkan masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan jumlah tamu yang dapat menginap di Wisma NTB dengan mendorong regulasi Wajib menginap tersebut.

Tabel 3.7. Realisasi Pelayanan Mobilisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Mobilisasi	1.000	1.131	1.229

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Jumlah Pelayanan mobilisasi sebanyak 1.229 meningkat dikarenakan selama masa transisi Pimpinan Daerah hanya ada 3 yaitu Gubernur, Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dan jumlah kegiatan koordinasi dan rapat kerja selama masa transisi lebih intens dikarenakan terdapat masa persiapan Pemilu Eksekutif dan Legislatif. Pelayanan mobilisasi diberikan kepada Pimpinan Daerah Provinsi NTB beserta perangkatnya selama melaksanakan kegiatan di Jabodetabek.

Kendaraan roda 4 di Badan Penghubung Daerah saat ini sudah berusia >10th dan memiliki banyak problem. Hal ini menunjukkan upaya yang ekstra dalam melaksanakan pelayanan mobilisasi di Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Dengan tuntutan intensitas pelayanan yang tinggi maka perlu biaya pemeliharaan yang besar. Untuk itu diperlukan kendaraan baru baik untuk operasional maupun kendaraan yang melekat pada Pimpinan.

Adapun untuk memaksimalkan pelayanan wisma dengan memaksimalkan pelayanan kamar seperti kebersihan, peremajaan pendingin ruangan, layanan sarapan hingga layanan mobilisasi tamu wisma NTB. Sedangkan dari sisi regulasi belum ada perkembangan yang signifikan atas proses dialog maupun penyampaian isu tersebut.

A.1.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan dilakukan untuk menilai kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi ini mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap program, organisasi dapat mengoptimalkan strategi, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pencapaian target kinerja.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya dimuat secara akuntabel untuk mendukung capaian kinerja atas sasaran meningkatkan kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	PAGU/TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub kegiatan 2.1.4 :	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Rp. 1.837.880.000	Rp. 1.818.861.400	98,97%		

SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	PAGU/TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 laporan	1 laporan		Kondisi Wisma NTB yang sedang dalam tahap peremajaan, dengan banyak fasilitas yang sudah tua dan memerlukan perbaikan, seperti wallpaper, penerangan, dan kamar mandi. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menentukan skala prioritas peremajaan fasilitas tersebut.	Badan Penghubung Daerah telah melakukan perbaikan pada wallpaper luar kamar, karpet, dan gordena, serta memulai penggantian sprei dan bed cover. Upaya ini sejalan dengan temuan bahwa fasilitas kamar yang memadai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu untuk meningkatkan pendapatan penginapan.

Serapan pelaksanaan anggaran dimaksimalkan hingga mencapai 98,97% untuk pelaksanaan pelayanan penghubung baik Pelayanan Pimpinan, Pelayanan Tamu Wisma NTB maupun Pelayanan Mobilisasi Pejabat Tinggi daerah serta kebutuhan pelaksanaan koordinasi antara hubungan pusat dengan Daerah.

A.1.2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek dengan Indikator Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan yang dihitung dengan Kuesioner dengan satuan persentase.

A.1.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) pada salah satu sasaran strategis renstra 2024-2026 yaitu meningkatnya kualitas koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek. Hal tersebut tercermin pada capaian kinerja yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI %	TINGKAT CAPAIAN 2024
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	95%	95,25%	100,26%

Berdasarkan tingkat kepuasan persentase pelayanan penghubung telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Tingkat Kepuasan Pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB terealisasi 95,26 % melebihi 0,26 % dari target 95 %.

A.1.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2024 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun 2024-2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Adapun

capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dituangkan dalam data series tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.10. Data Series Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Kinerja	Capaian	Target	Kinerja	Capaian	Target	Kinerja	Capaian
Sasaran 2 :	Indikator Sasaran 2:									
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	-	-	-	-	-	-	95%	95,25%	100,26%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat bahwa indikator kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan merupakan indikator baru di tahun 2024. Dimana selama evaluasi tahun 2022 dan 2023 terhadap regulasi yang ada serta fakta dan data di lapangan, Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB mengidentifikasi indikator koordinasi kelembagaan merupakan fungsi terpisah dari pelayanan umum dan promosi dan informasi.

A.1.2.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024

Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah tahun 2024 disajikan dengan cara membandingkan Target Kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	95%	95%	95,25%	100,26%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Realisasi target kinerja terlampaui dengan capaian 100,26% hal ini dapat tercapai karena peran sub bidang Hubungan Antar Lembaga pada dasarnya telah terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja belum teridentifikasi menjadi indikator kinerja Badan Penghubung Daerah.

A.1.2.4. Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian Nasional

Dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah tahun 2024 – 2026 Badan Penghubung Daerah memiliki tugas dan fungsi pelayanan pimpinan, sebagai OPD penunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap Kepala Daerah saat berada di Ibu Kota. Dan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tidak mengintervensi indikator kinerja Nasional.

A.1.2.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan alternative yang telah dilakukan

Target kinerja kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan pada renja tahun 2024 adalah 95% sedangkan realisasi yang didapatkan 95,25% dengan capaian yang diraih sebesar 100,26%. Capaian tersebut dapat diraih dalam kinerja oprasional sebagai faktor pendukung yang akan dijelaskan dengan analisa dibawah ini.

Tabel 3.12. Realisasi Pelayanan Koordinasi Kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2022-2024

Indikator Bidang Urusan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Layanan Fasilitasi Dan Koordinasi Tugas Kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Di Jakarta Dan Sekitarnya	175	216	175	221	175	190

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tahun 2024 memiliki target Pelayanan Badan Penghubung Daerah sesuai tugas dan fungsi sebagai penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat baik fasilitasi pimpinan, protokol maupun administrasi kelembagaan dengan target 175 layanan dan realisasi mencapai 190 atau 108,6% dari target yang telah ditentukan. Dimana capaian layanan tersebut terdiri atas 131 kegiatan pimpinan yang sudah terfasilitasi atas koordinasi dengan kementrian dan lembaga serta 59 Dokumen Daerah Nusa Tenggara Barat telah di ambil dari kementrian/lembaga dan dikirimkan ke daerah.

Tabel 3.13. Jumlah Warga Terlantar asal NTB yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023-2024

Tahun	2022	2023	2024
Jumlah Warga Asal NTB	10 Warga	1 Warga	22 Warga

Jumlah warga terlantar asal NTB yang dibantu setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlahnya tercatat 10 orang, kemudian menurun drastis menjadi 1 orang pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 22 orang pada tahun 2024. Fasilitasi terhadap warga terlantar ini hampir semuanya diakibatkan oleh konflik di Negara tempat mereka bekerja.

- **Faktor Penyebab Keberhasilan :** Kesigapan Pelaksanaan Pelayanan Koordinasi dan Fasilitasi Protokol dari Badan Penghubung Daerah dilaksanakan tidak hanya sesuai standar oprasional namun juga terdapat inisiatif-inisiatif dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Adanya sarana komunikasi *Handy Talkie* memudahkan dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan.
- **Faktor Penyebab Kegagalan :** Belum sepenuhnya perangkat pendukung untuk pelaksanaan pelayanan protokol. Dalam pelaksanaan pelayanan protokol yang prima dibutuhkan tab baik untuk efesiensi persiapan hingga checklist pelaksanaan kegiatan hingga monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Dari sisi pelayanan masyarakat terlantar sejauh ini dilaksanakan tanpa ada anggaran yang teralokasi khusus, diharapkan dimasa berikutnya dapat dianggarkan sesuai dengan rancangan yang telah dimuat dalam Renstra dan Renja.

A.1.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas suatu organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya, baik finansial, manusia, maupun material, dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan terbesar dalam sasaran ini adalah belum tersedianya anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga Badan Penghubung Daerah harus menyusun strategi untuk mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini beberapa optimalisasi sumber daya yang dilakukan sebagai langkah meningkatkan Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek :

- Kegiatan komunikasi, pengembangan wawasan dan kerjasama dengan organisasi sosial dan masyarakat. Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, pengembangan wawasan, dan kerjasama dengan organisasi sosial dan masyarakat. Salah satunya adalah partisipasi dalam acara yang menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya dan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa kegiatan tersebut merupakan hasil crosscutting dengan kelompok masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Seperti kegiatan silaturahmi ikatan keluarga besar Sumbawa di TMII dan Pertemuan Rapat Mahasiswa di Wisma NTB.
- Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berperan aktif dalam memfasilitasi dan memperkuat hubungan antara berbagai lembaga, kementerian, perwakilan negara, perangkat daerah, pemerintah daerah tingkat II, dan masyarakat NTB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Mitra Perangkat daerah seperti Komisi I, BKD, Inspektorat serta BAPPEDA yang membutuhkan kepanjangan tangan dalam berkoordinasi dengan Kementrian dan Lembaga di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
- Koordinasi dan pelayanan Masyarakat NTB yang terlantar di Jabodetabek. Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berperan penting dalam memberikan pelayanan dan koordinasi bagi masyarakat NTB yang mengalami kesulitan di wilayah Jabodetabek. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di Ibu Kota, Badan Penghubung NTB memiliki fungsi untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat NTB yang berada di luar daerah. Fasilitas pemulangan PMI atas konflik Suriah merupakan salah satu andil Badan Penghubung Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

A.1.2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan dilakukan untuk menilai kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi ini mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap program, organisasi dapat mengoptimalkan strategi, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pencapaian target kinerja.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya dimuat secara akuntabel untuk mendukung capaian kinerja atas sasaran meningkatkan Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tahun 2024

SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	PAGU/TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub kegiatan 2.1.3 :	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	Rp. 4.916.700	Rp. 4.916.700	100%		
Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 laporan	1 laporan		Hingga saat ini belum terdapat anggaran untuk penanganan masyarakat NTB yang terlantar. Padahal setiap periode terdapat masyarakat terlantar, baik pengungsi maupun pemulangan tenaga kerja.	Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Penghubung Daerah telah memberikan pelayanan dan fasilitasi di Wisma NTB.

Serapan pelaksanaan anggaran hingga mencapai 100% namun baru dapat dianggarkan untuk pelaksanaan administratif seperti laporan kegiatan dan dokumen penunjang lainnya. Hingga saat ini Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB berusaha mengajukan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada indikator ini.

A.1.3. Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII

Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII dengan Indikator Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI yang dihitung dengan Kuesioner dengan satuan persentase.

A.1.3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Capaian Perjanjian Kinerja (PK) pada salah satu sasaran strategis renstra 2024-2026 yaitu meningkatnya kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII. Hal tersebut tercermin pada capaian kinerja yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI %	TINGKAT CAPAIAN 2024
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI	95%	95,25%	100,26%

Berdasarkan tingkat kepuasan persentase pelayanan penghubung telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI terealisasi 95,26 % melebihi 0,26 % dari target 95 %.

A.1.3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2024 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun 2024-2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dituangkan dalam data series tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.16. Data Series Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Kinerja	Capaian	Target	Kinerja	Capaian	Target	Kinerja	Capaian
Sasaran 3 :	Indikator Sasaran 3:									
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	85%	85%	100%	100%	95%	95%	95%	95,25%	100,26%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Dari tabel yang disajikan terdapat peningkatan kepuasan terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII sebesar 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana capaian ini didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana Anjungan NTB yang semakin optimal.

A.1.3.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024

Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah tahun 2024 disajikan dengan cara membandingkan Target Kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Renstra yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMII	95%	95%	95,25%	100,26%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2024

Realisasi target kinerja terlampaui dengan capaian 100,26% hal ini dapat tercapai karena konsistensi peningkatan sarana dan pra sarana Anjungan Daerah NTB secara bertahap.

A.1.3.4. Perbandingan capaian tahun 2024 dengan capaian Nasional

Dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah tahun 2024 – 2026 Badan Penghubung Daerah memiliki tugas dan fungsi pelayanan pimpinan, sebagai OPD penunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap Kepala Daerah saat berada di Ibu Kota. Dan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tidak mengintervensi indikator kinerja Nasional.

A.1.3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan alternative yang telah dilakukan

Target kinerja kepuasan penerima pelayanan Pengunjung Terhadap Pelayanan Anjungan NTB Di TMI pada renja tahun 2024 adalah 95% sedangkan realisasi yang didapatkan 95,25% dengan capaian yang diraih sebesar 100,26%. Capaian tersebut dapat diraih dalam kinerja oprasional sebagai faktor pendukung yang akan dijelaskan dengan analisa dibawah ini.

Tabel 3.18 Jumlah Pengunjung Anjungan NTB
Provinsi NTB Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
➤ Wisatawan Mancanegara	Orang	167	27	88	512	532
➤ Wisatawan Nusantara	Orang	15.162	4.607	15.989	40.138	35.061
➤ Pelajar/Mahasiswa	Orang	1.322	193	1.025	7.847	8.337
JUMLAH		49.352	16.651	17.102	48.497	43.930

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2024

Capaian tingkat kepuasan pelayanan penghubung di TMII dipengaruhi oleh angka kunjungan pada Anjungan NTB di TMII mengalami inflasi atau penurunan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh force majeure yaitu Pandemi Covid-19 dimana diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) serta Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2020 hingga menjelang akhir tahun tahun 2022. Keadaan ini menghalangi tamu untuk melakukan kunjungan wisata ke TMII belum lagi ditambah pergantian pengelola dimana sebelumnya Yayasan Harapan Kita diambil oleh Pemerintah melalui Kemensetneg RI lalu dipindahkan ke BUMN PT. Taman Wisata Candi yang bekerja sama dengan PT. Bhumi Visatanda yang memberlakukan beberapa kebijakan yang dinilai mempengaruhi angka kunjungan diantaranya pembatasan kendaraan emisi di TMII serta akses Tamu anjungan yang dikenakan pembayaran saat masuk ke TMII.

Adapun upaya untuk memaksimalkan pelayanan Anjungan NTB dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana yang sifatnya pemeliharaan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Serta menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas pecinta Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dapat membuka peluang dalam kegiatan pentas seni budaya.

- **Faktor Penyebab Keberhasilan** : Kesigapan Pelaksanaan Pelayanan Pemandu Wisata pada Anjungan Daerah NTB dilaksanakan sesuai standar dan selalu dilakukan evaluasi berkala untuk peningkatan pelayanan Wisata di Anjungan NTB. Adanya sarana kendaraan listrik memudahkan pengunjung Anjungan NTB untuk mengakses Anjungan NTB yang letaknya di tengah komplek TMII.
- **Faktor Penyebab Kegagalan** : Jumlah kendaraan listrik belum mencapai ideal mesti diupayakan penambahan 1 unit kendaraan listrik untuk pengunjung anjungan NTB. Faktor lainnya adalah tidak sesuaian bangunan Anjungan Daerah NTB sebagai representasi budaya Nusa Tenggara Barat. Untuk mengatasi masalah ini Kepala Badan Penghubung Daerah telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan masterplan Anjungan NTB di TMII sesuai dengan tindak lanjut hasil pertemuan rapat rencana penyusunan masterplan Anjungan NTB di TMII yang diadakan ke BAPPEDA. Dan memberikan output masterplan Anjungan NTB di TMI

A.1.3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas suatu organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh

mana sumber daya, baik finansial, manusia, maupun material, dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Badan Penghubung Daerah dilakukan disisi oprasional (teknis) berikut ini penjelasan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan *intermediate result* atas hasil cascading pada tahun 2024 yang dijelaskan dalam beberapa poin dibawah ini:

- Kreatifitas dan inovasi pelayanan Badan Penghubung NTB di Jakarta. Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi pelayanannya. Salah satu langkah yang diambil adalah mendukung pengembangan kreativitas lokal dan mempromosikan industri kreatif melalui gerai NTB mall di Wisma NTB pada tahun 2023 hingga saat ini. Melalui berbagai kegiatan, Badan Penghubung NTB berupaya memperkenalkan produk-produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. Selain itu Badan Penghubung Daerah juga melakukan Inovasi dalam mempromosikan budaya Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan Augmented Reality (AR) serta Interactive Touchscreen Kiosk di Anjungan Daerah NTB di TMII.
- Pengenalan Nusa Tenggara Barat melalui event promosi pada tahun 2024 dilakukan Badan Penghubung Daerah melalui kegiatan baik pentas seni budaya maupun fasilitasi kegiatan promosi potensi daerah seperti fasilitasi Dekranasda dan Ibu-Ibu PKK dalam Pameran-pameran yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dalam kegiatan pentas seni Badan Penghubung Daerah mampu menampilkan 14 event promosi dengan ketersediaan anggaran 8 kegiatan yang di targetkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
- Angka penerima informasi seni dan budaya NTB pada Anjungan NTB TMII pada tahun 2024 sebanyak 45.930 orang pengunjung Anjungan Daerah NTB di TMII. Dimana kreatifitas pemandu wisata dalam menarik perhatian pengunjung serta menjelaskan adat dan budaya NTB. Selain itu Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait seni dan budaya NTB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui media sosial, seperti akun Instagram resmi

A.1.3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan dilakukan untuk menilai kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi ini mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap program, organisasi dapat mengoptimalkan strategi, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pencapaian target kinerja.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya dimuat secara akuntabel untuk mendukung capaian kinerja atas sasaran meningkatkan Meningkatnya Kualitas fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tahun 2024

SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	PAGU/TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub kegiatan 2.1.1 :	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI	Rp. 621.105.270	Rp. 621.105.270	100%		
Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	8 laporan	14 laporan		Kondisi Anjungan NTB di TMII yang memprihatinkan dengan bangunan tua yang tidak sesuai regulasi pengelola TMII dan fasilitas yang belum memadai. Selain itu, regulasi TMII mengharuskan setiap Anjungan memenuhi standar tradisi lokal dan mendukung program zero emission, menambah kompleksitas tantangan.	Badan Penghubung Daerah telah mengambil langkah strategis, seperti pengadaan mobil listrik pada tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap program zero emission, dengan rencana penambahan mobil listrik pada tahun 2025. Selain itu, upaya penyesuaian bangunan tengah dilakukan melalui penyusunan Masterplan Anjungan NTB, yang menjadi langkah awal dalam memenuhi persyaratan regulasi sekaligus meningkatkan fasilitas dan representasi kearifan lokal.

Serapan pelaksanaan anggaran hingga mencapai 100% namun kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tidak hanya dibatasi oleh anggaran dalam dokumen pelaksanaan akan tetapi Badan Penghubung Daerah juga melakukan crosscutting dengan pihak lainnya dalam upaya memperkenalkan budaya Nusa Tenggara Barat. Hal ini terlihat dari jumlah pelaksanaan kegiatan promosi sejumlah 14 sedangkan target hanya 8 kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, setiap anggaran atau keuangan yang dikeluarkan harus memiliki nilai kinerja, untuk itu program kegiatan yang dilaksanakan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

- Pada tahun 2025 alokasi belanja APBD Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB sebanyak Rp. 17.398.149.258,- dengan rincian : Belanja Gaji dan tunjangan ASN Rp. 6.862.481.311,- belanja rutin oprasional Rp. 7.273.354.630,- serta belanja Modal Rp. 629.011.000,-
- Realisasi Belanja APBD s.d 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 16.816.434.712 atau 96,66 persen

Tabel 3.20.
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima Badan Penghubung Provinsi NTB		BADAN PENGHUBUNG DAERAH	Persentase kepuasan pelayanan Penghubung kepada Penerima Layanan	56.190.766.511	32.637.343.877	17.398.149.258	16.816.434.712	96,66	16.816.434.712	30%	
		Program 1 :									
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup DPD	48.354.016.421	29.416.050.077	14.934.247.288	14.371.551.342	96,23	14.371.551.342	30%	
		Kegiatan 1.1 :									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	97.451.000	49.341.600	31.067.000	31.067.000	100,00	31.067.000	32%	
		Sub kegiatan 1.1.1:									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.802.000	6.674.000	6.428.000	6.428.000	100,00	6.428.000	32%	
		Sub kegiatan 1.1.2 :									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	14.402.000	3.389.500	6.285.000	6.285.000	100,00	6.285.000	44%	
		Sub kegiatan 1.1.3 :									
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	13.889.000	6.114.000	6.114.000	6.114.000	100,00	6.114.000	44%	
		Sub kegiatan 1.1.4 :									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	11.702.000	15.363.100	2.385.000	2.385.000	100,00	2.385.000	20%	
		Sub kegiatan 1.1.5 :									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	14.402.000	9.194.000	3.285.000	3.285.000	100,00	3.285.000	23%	
		Sub kegiatan 1.1.6 :									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.802.000	3.936.000	6.570.000	6.570.000	100,00	6.570.000	33%	
		Sub kegiatan 1.1.7 :									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.452.000	4.671.000	-	-	-	-	-	
		Kegiatan 1.2 :									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.630.006.671	16.220.416.010	7.226.254.630	6.862.481.311	94,97	6.862.481.311	35%	
		Sub kegiatan 1.2.1:									
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.606.243.671	16.220.416.010	7.226.254.630	6.862.481.311	94,97	6.862.481.311	35%	
		Sub kegiatan 1.2.2:									
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.009.000	-	-	-	-	-	-	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Sub kegiatan 1.2.3:									
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.009.000	-	-	-	-	-	-	
		Sub kegiatan 1.2.4:									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.823.000	-	-	-	-	-	-	
		Sub kegiatan 1.2.5:									
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.922.000	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan 1.3 :									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	58.917.000	42.192.400	18.151.500	18.151.500	100,00	18.151.500	31%	
		Sub kegiatan 1.3.1:									
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	58.917.000	42.192.400	18.151.500	18.151.500	100,00	18.151.500	31%	
		Kegiatan 1.4 :									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	136.519.980	-	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	18%	
		Sub kegiatan 1.4.1:									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	73.509.990	-	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	34%	
		Sub kegiatan 1.4.2:									
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Bimbingan Teknis Pegawai	63.009.990	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan 1.5 :									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.154.865.080	2.765.881.328	2.556.970.100	2.555.039.653	99,92	2.555.039.653	50%	
		Sub kegiatan 1.5.1:									
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	298.784.000	158.973.500	240.425.800	240.425.800	100,00	240.425.800	80%	
		Sub kegiatan 1.5.2:									
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.301.777.400	370.096.415	828.012.800	828.012.800	100,00	828.012.800	64%	
		Sub kegiatan 1.5.3:									
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	116.212.700	134.135.300	262.809.500	262.809.500	100,00	262.809.500	226%	
		Sub kegiatan 1.4.4:									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.480.990	26.131.500	12.997.000	12.997.000	100,00	12.997.000	43%	
		Sub kegiatan 1.4.5:									
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	57.609.990	51.900.000	10.800.000	10.800.000	100,00	10.800.000	19%	
		Sub kegiatan 1.4.6:									
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.700.000.000	304.000.000	450.000.000	449.380.000	99,86	449.380.000	26%	
		Sub kegiatan 1.4.7:									
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.650.000.000	1.520.674.613	751.925.000	750.614.553	99,83	750.614.553	45%	
		Kegiatan 1.5 :									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaaaan barang milik daerah	3.716.260.990	32.030.000	285.567.000	285.100.000	99,84	285.100.000	8%	
		Sub kegiatan 1.5.1:									
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3.130.009.990	-	-	-	-	-	-	
		Sub kegiatan 1.5.2:									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	586.251.000	32.030.000	285.567.000	285.100.000	99,84	285.100.000	49%	
		Kegiatan 1.6 :									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12.906.823.720	8.414.434.606	3.624.633.058	3.467.567.434	95,67	3.467.567.434	27%	
		Sub kegiatan 1.6.1:									
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.000.000	69.511.200	30.600.000	22.485.640	73,48	22.485.640	12%	
		Sub kegiatan 1.6.2:									
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.035.374.800	1.412.985.440	666.780.000	540.361.381	81,04	540.361.381	27%	
		Sub kegiatan 1.6.3:									
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	597.230.000	67.580.000	59.300.000	59.300.000	100,00	59.300.000	10%	
		Sub kegiatan 1.6.3:									
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10.079.218.920	6.864.357.966	2.867.953.058	2.845.420.413	99,21	2.845.420.413	28%	
		Kegiatan 1.7 :									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6.653.171.980	1.891.754.133	1.166.604.000	1.127.144.444	96,62	1.127.144.444	17%	
		Sub kegiatan 1.7.1:									
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.984.190.000	1.214.950.021	404.590.000	404.498.539	99,98	404.498.539	20%	
		Sub kegiatan 1.7.2:									
		Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	162.009.990	55.070.000	39.600.000	39.600.000	100,00	39.600.000	24%	
		Sub kegiatan 1.7.3:									
		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.459.632.000	621.734.112	707.604.000	668.235.905	94,44	668.235.905	15%	
		Sub kegiatan 1.7.4:									
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47.339.990	-	14.810.000	14.810.000	100,00	14.810.000	31%	
		Program 2:									
		Program Pelayanan Penghubung	Angka kunjungan wisatawan pada anjungan NTB di TMI	7.836.750.090	3.221.293.800	2.463.901.970	2.444.883.370	99,23	2.444.883.370	31%	
		Kegiatan 2.1 :									

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	7.836.750.090	1.832.216.300	2.463.901.970	2.444.883.370	99,23	2.444.883.370	31%	
	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Informasi Seni dan Budaya pada Anjungan NTB di TMII	Sub kegiatan 2.1.1 :	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI								
		Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1.476.027.900	894.950.000	621.105.270	621.105.270	100,00	621.105.270	42%	
		Sub kegiatan 2.1.2 :									
		Kegiatan fasilitasi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	105.009.990	78.567.500	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga di Jabodetabek	Sub kegiatan 2.1.3 :	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan								
		Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.620.580.500	2.247.776.300	4.916.700	4.916.700	100,00	4.916.700	0%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	Sub kegiatan 2.1.4 :	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	-			-				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023	Target Anggaran RENJA Tahun 2024	Realisasi Capaian Anggaran RENJA Tahun 2024	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024	Tingkat Capaian Anggaran Renstra pada Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024(%)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.635.131.700	-	1.837.880.000	1.818.861.400	98,97	1.818.861.400	39%	

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2024 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun 2024-2026 dimana capaian tersebut telah berhasil diperoleh dengan adanya dukungan Kinerja yang telah tersusun dan Anggaran yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran selama Tahun Anggaran 2024.

Adapun analisis program kegiatan dituangkan dalam tabel capaian indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Per Bidang Urusan Tahun 2024 yang memuat permasalahan yang terjadi di tahun 2024 serta upaya mengatasi permasalahan tersebut mulai dari program hingga sub kegiatan.

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Per Bidang Urusan Tahun 2024

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program 1 :					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	80	75,61		
Kegiatan 1.1 :					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan		

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perangkat Daerah yang tersusun				
Sub kegiatan 1.1.1:					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki format yang hampir sering berubah sehingga harus update dengan informasi terbaru.	Melakukan koordinasi secara intens pada BAPPEDA Provinsi NTB
Sub kegiatan 1.1.2 :					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan kebutuhan prioritas SKPD dan tarik menarik pagu indikatif menjadi tantangan dalam sub kegiatan ini.	Melakukan koordinasi secara intens pada BPKAD dan BAPPEDA Provinsi NTB
Sub kegiatan 1.1.3 :					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan kebutuhan prioritas SKPD dan tarik menarik pagu indikatif menjadi tantangan dalam sub kegiatan ini.	Melakukan koordinasi secara intens pada BPKAD dan BAPPEDA Provinsi NTB
Sub kegiatan 1.1.4 :					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 dokumen	1 dokumen	Pergantian pimpinan secara teknis mempengaruhi tanda tangan dan nama di SIPD saat di cetak.	Melakukan perbaikan manual sesuai dengan kebutuhan pada nama pejabat yang seharusnya tercantum.
Sub kegiatan 1.1.5 :					
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 dokumen	1 dokumen	Pergantian pimpinan secara teknis mempengaruhi tanda tangan dan nama di SIPD saat di cetak.	Melakukan perbaikan manual sesuai dengan kebutuhan pada nama pejabat yang seharusnya tercantum.
Sub kegiatan 1.1.6 :					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja saat ini masih berada pada level Instansi sehingga kolektif data masih dilakukan manual dan belum bertingkat.	Melakukan sosialisasi di sub bidang untuk menyepakati format laporan dan dikerjakan secara Triwulan di tahun 2025
Sub kegiatan 1.1.7 :					

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan saat ini masih dilakukan secara instansi belum dilakukan di level eselon 4.	Melakukan sosialisasi di sub bidang untuk menyepakati format laporan dan dikerjakan secara Triwulan di tahun 2025
Kegiatan 1.2 :					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,59		
Sub kegiatan 1.2.1:					
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	47 orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan mencukupi selama 1 tahun sesuai kertas kerja dari TAPD dan belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.2.2:					
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.2.3:					
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dan belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.2.4:					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.2.5:					
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan Laporan Triwulan saat ini masih dilakukan secara instansi belum dilakukan di level eselon 4.	Melakukan sosialisasi di sub bidang untuk menyepakati format laporan dan dikerjakan secara Triwulan di tahun 2025
Kegiatan 1.3 :					

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	100		
Sub kegiatan 1.3.1:					
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Penyusunan RKBMD mencukupi selama 1 tahun belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Kegiatan 1.4 :					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen		
Sub kegiatan 1.4.1:					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Pelatihan	1 Pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM SKPD untuk tugas dan fungsi sangat dibutuhkan dan jumlah anggaran belum mencukupi.	Peningkatan Kapasitas SDM untuk tugas dan fungsi dilakukan bertahap sesuai ketersediaan anggaran SKPD.
Sub kegiatan 1.4.2:					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Bimbingan Teknis Pegawai	-	-	Peningkatan kapasitas SDM SKPD untuk wawasan Peraturan dan Perundang-undangan sangat dibutuhkan dan jumlah anggaran belum mencukupi.	Peningkatan Kapasitas SDM untuk wawasan Peraturan dan Perundang-undangan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi secara online maupun streaming Youtube.
Kegiatan 1.5 :					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	100		
Sub kegiatan 1.5.1:					
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 jenis	Penyediaan bahan bacaan mencukupi selama 1 tahun belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.5.2:					
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12 jenis	Jumlah Pagu SKPD tidak mencukupi untuk peremajaan sarana dan prasarana yang sudah layak berganti selama 1 tahun.	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana secara prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran.

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub kegiatan 1.5.3:					
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	10 jenis	Penyediaan bahan logistik mencukupi selama 1 tahun belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.4.4:					
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	Penyediaan bahan bacaan mencukupi selama 1 tahun belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.4.5:					
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 bacaan	5 bacaan	Penyediaan bahan bacaan mencukupi selama 1 tahun belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.4.6:					
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	Jumlah kegiatan pelayanan pimpinan selama 1 tahun belum sebanding dengan SPPD dalam daerah SKPD.	Memberikan SPPD Dalam Daerah dengan prinsip adil dan selektif dari jam pelayanan yang melebihi waktu kerja.
Sub kegiatan 1.4.7:					
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	117 laporan	Jumlah undangan rapat teknis di NTB cukup banyak dan SPPD luar daerah tidak mencukupi untuk kegiatan 1 tahun.	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk kegiatan yang bisa dilakukan jarak jauh agar tidak dihadiri secara langsung.
Kegiatan 1.5 :					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100		
Sub kegiatan 1.5.1:					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Kondisi kendaraan operasional di Badan Penghubung Daerah saat ini sudah berusia lebih dari 10 tahun sehingga membutuhkan biaya yang besar.	Mengusulkan pengadaan kendaraan baru terutama kendaraan pimpinan yang baru akan dilantik di tahun 2025.
Sub kegiatan 1.5.2:					

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	5 unit	Jumlah kendaraan Listrik ideal di Anjungan TMII adalah 2 shuttle namun pada tahun 2024 baru dapat diadakan 1 kendaraan.	Melakukan usulan pengadaan kendaraan listrik (shuttle) pada tahun anggaran 2025
Kegiatan 1.6 :					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100		
Sub kegiatan 1.6.1:					
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	Penyediaan jasa surat menyurat tercukupi selama tahun 2024.	Perlu adanya review terkait intensitas administrasi dengan pimpinan yang baru di tahun 2025.
Sub kegiatan 1.6.2:					
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	Fluktuasi tarif listrik menjadi permasalahan selama tahun anggaran, yang mana tidak ada sumber lain dalam sub kegiatan yang dapat di geser untuk mencukupi kebutuhan.	Melakukan pergeseran pada saat periode perubahan tahun 2024.
Sub kegiatan 1.6.3:					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran.	Melakukan Penyediaan perbaikan peralatan dan perlengkapan secara swadaya dari pegawai jika tidak memerlukan peralatan dan perlengkapan tambahan selama perbaikan.
Sub kegiatan 1.6.3:					
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum masih terdapat kekurangan dalam tenaga kebersihan Wisma NTB yang memiliki tupoksi pelayanan tamu Wisma NTB.	Mengusulkan pengadaan tenaga kebersihan yang saat ini terkendala penambahan tenaga kerja atas SE Kemenpan RB tahun 2023 lalu.
Kegiatan 1.7 :					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	99,88		

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub kegiatan 1.7.1:					
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 unit	23 unit	Kondisi kendaraan oprasional di Badan Penghubung Daerah saat ini sudah berusia lebih dari 10 tahun sehingga membutuhkan biaya yang besar.	Mengusulkan pengadaan kendaraan baru terutama kendaraan pimpinan yang baru akan dilantik di tahun 2025.
Sub kegiatan 1.7.2:					
Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	13 unit	31 unit	Penyediaan bahan bacaan mencukupi selama 1 tahun belum ada permasalahan untuk sub kegiatan ini.	-
Sub kegiatan 1.7.3:					
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 gedung	Kondisi Bangunan Wisma NTB memprihatinkan dan belum lagi terdapat bangunan di Anjungan Daerah NTB yang tidak mewakili budaya Nusa Tenggara Barat.	Mengusulkan anggaran pemeliharaan untuk Wisma dan Anjungan NTB pada tahun 2025 serta menyusun Masterplan Anjungan Daerah NTB di TMII
Sub kegiatan 1.7.4:					
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	3 unit	Kondisi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor saat ini cukup memprihatinkan, dengan kondisi anggaran saat ini masih berfokus pada pemeliharaan gedung Wisma dan Anjungan Daerah NTB.	Pemeliharaan akan diusulkan di tahun 2026 terkait prioritas pengerjaan menunggu pemeliharaan gedung/bangunan.
Program 2:					
Program Pelayanan Penghubung	Angka kunjungan wisatawan pada anjungan NTB di TMII	43.000	43.930		
Kegiatan 2.1 :					
Pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	7 laporan	14 laporan		
Sub kegiatan 2.1.1 :	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan anjungan NTB di TMI	95%	95,25%		
Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	8 laporan	14 laporan	Kondisi Anjungan NTB di TMII yang memprihatinkan dengan bangunan tua yang tidak sesuai regulasi pengelola TMII dan fasilitas yang belum memadai. Selain itu, regulasi TMII mengharuskan setiap Anjungan	Badan Penghubung Daerah telah mengambil langkah strategis, seperti pengadaan mobil listrik pada tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap program zero emission, dengan rencana

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				memenuhi standar tradisi lokal dan mendukung program zero emission, menambah kompleksitas tantangan.	penambahan mobil listrik pada tahun 2025. Selain itu, upaya penyesuaian bangunan tengah dilakukan melalui penyusunan Masterplan Anjungan NTB, yang menjadi langkah awal dalam memenuhi persyaratan regulasi sekaligus meningkatkan fasilitas dan representasi kearifan lokal.
Sub kegiatan 2.1.2 :					
Kegiatan fasilitasi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	-		
Sub kegiatan 2.1.3 :	Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi kelembagaan	95%	95,11%		
Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 laporan	1 laporan	Hingga saat ini belum terdapat anggaran untuk penanganan masyarakat NTB yang terlantar. Padahal setiap tahun selalu ada penanganan masyarakat terlantar, baik pengungsi maupun pemulangan tenaga kerja yang memiliki problem.	Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Penghubung Daerah telah memberikan pelayanan dan fasilitasi di Wisma NTB.
Sub kegiatan 2.1.4 :	Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu Wisma NTB dan Pejabat Tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi NTB	95%	95,33%		
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 laporan	1 laporan	Kondisi Wisma NTB yang sedang dalam tahap peremajaan, dengan banyak fasilitas yang sudah tua dan memerlukan perbaikan, seperti wallpaper, penerangan, dan kamar mandi. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menentukan skala prioritas peremajaan fasilitas tersebut.	Badan Penghubung Daerah telah melakukan perbaikan pada wallpaper luar kamar, karpet, dan gorden, serta memulai penggantian sprei dan bed cover. Upaya ini sejalan dengan temuan bahwa fasilitas kamar yang memadai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu untuk meningkatkan pendapatan penginapan.

PENUTUP

Pendapatan asli daerah pada Wisma NTB tercapai 113,6% pada tahun 2024 jika dilihat dari target BAPPEDA namun belum sempurna dengan capaian 99,59% dari target yang ditetapkan dalam RPD. Tingkat hunian pada Mess NTB masih rendah disebabkan kondisi ruang, fasilitas, sarana dan prasarana penginapan perlu dilakukan peremajaan dan belum ada regulasi yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara provinsi NTB untuk menginap di Wisma NTB pada saat melakukan perjalanan dinas di Jakarta.

Anjungan NTB pada TMII melampaui angka kunjungan yang ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan sarana kendaraan listrik yang dihimbau oleh pengelola dan Sekretariat Negara untuk dimiliki tiap-tiap anjungan.

Pelayanan Kelembagaan merupakan fungsi Badan Penghubung yang teridentifikasi sebagai penunjang capaian IKU Badan Penghubung Daerah. Semoga pada tahun berikutnya dapat dikembangkan lebih luas namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pada dimensi lain, permintaan penyusunan masterplan dari Pengelola TMII atas temuan ketidaksesuaian representasi budaya pada bangunan Anjungan NTB di TMII. Menjadi fokus Badan Penghubung Daerah beserta Mitra Perangkat Daerah untuk secara bertahap membenahi kawasan Anjungan NTB yang menjadi jendela informasi daerah Provinsi NTB.

Demikian LKjIP Tahunan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta dapat memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tahun berikutnya.